

ABSTRAK

Insubordinasi merupakan tindak pidana melawan atasan yang dilakukan oleh prajurit TNI. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 103-109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Namun pada faktanya masih banyak prajurit yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan yaitu melakukan tindak pidana insubordinasi tidak menaati perintah dinas. Meningkatnya kasus tersebut di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menunjukkan bahwa adanya kendala yang mempengaruhi pada proses penjatuhan sanksi nya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penjatuhan sanksi pidana terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana insubordinasi tidak menaati perintah dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan fokus pada kendala-kendala yang muncul dalam proses penjatuhan sanksinya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan eksploratif dan pendekatan kasus. Data yang menjadi bahan kajian adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan dokumentasi kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Berikutnya data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian keseluruhan data wawancara dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses penjatuhan sanksi pidana melibatkan beberapa tahap, di mulainya penerimaan laporan tindak pidana hingga tahap akhir sampai pada Lembaga Masyarakat Militer (Lemasmil). Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yakni: adanya kendala ketidakhadiran Terdakwa yang berujung pada tindak pidana desersi karena perbedaan kepentingan antara aparat penegak hukum dan ANKUM dan lemahnya alat bukti seperti dokumen masih berupa fotocopy serta seringkali tidak adanya saksi yang menyaksikan tindakan tersebut. Kendala-kendala ini secara langsung dapat memengaruhi pertimbangan hakim. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim menerapkan pertimbangan yuridis berdasarkan bukti sah dan non-yuridis berdasarkan faktor meringankan atau memberatkan, sejalan dengan gabungan teori pemidanaan untuk memastikan hukuman yang dijatuhkan bersifat adil dan proporsional.

Kata Kunci: Penjatuhan Sanksi, Insubordinasi, Militer

ABSTRACT

In fact, there are still many soldiers who do not comply with the regulations that have been set, namely committing the crime of insubordination and disobeying official orders. The increase in cases at the Military Court III-12 Surabaya shows that there are obstacles that affect the sanction process. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the imposition of criminal sanctions on soldiers who commit the crime of insubordination of disobeying service orders at the Military Court III-12 Surabaya, focusing on the obstacles that arise in the process of imposing sanctions.

This research is an empirical legal research using an exploratory approach. The data that became the subject of the study were primary data obtained through direct interviews and documentation to the Judge and Registrar of the Military Court III-12 Surabaya. Next, secondary data obtained through literature studies, then the entire interview data is analyzed in a qualitative descriptive manner.

The results of the study show that there are several obstacles in the implementation of sanctions for the crime of insubordination "disobeying official orders" at the Military Court III-12 Surabaya, namely the absence of the Defendant which leads to the crime of desertion due to the difference in interests between law enforcement officials and ANKUM and the weakness of evidence such as documents still in the form of photocopies and often the absence of witnesses who witnessed the act. These constraints directly affect the judge's consideration. In imposing criminal sanctions, judges apply juridical (based on valid evidence) and non-juridical considerations (based on mitigating or aggravating factors), in line with a combination of criminal theories to ensure that the sentences imposed are fair and proportionate.

Keywords: Sanctions, Insubordination, Military.